

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N., & Muladi. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Aris Prio Agus Santoso, Rifai, A., Sukendar, & Gegen, G. (2022). *Hukum acara pidana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya (KUHP)*. Jakarta: Politeia.

Peraturan Perundang - Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

Asshofa, M. M., Humaeroh, N. S., & Fitriani, R. E. (2022). Analisis penetapan surat dakwaan terhadap suatu tindak pidana. *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 39–49.

Rudipta, E., Wahyudi, S., & Budiyo. (2021). Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan (Tinjauan yuridis terhadap Putusan PN Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt). *S.L.R.*, 3(3), 398–408.

Rudipta, E., Wahyudi, S., & Budiyo. (2021). Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan (Tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, 3, 3–4.

Soponyono, E. (2023). Pentingnya formulasi dakwaan dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 77.

Website

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. (2025). *Profil dan sejarah kejaksaan*. <https://badiklat.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>

Kejaksaan Negeri Kota Malang. (2025). *Profil - Tentang Kami*. <https://kejari-kotamalang.kejaksaan.go.id/profil/tentangKami>

Kejaksaan Negeri Kota Malang. (2025). *Bidang pembinaan*. <https://kejari-kotamalang.kejaksaan.go.id/bidang/babin>

Kejaksaan Negeri Kota Malang. (2025). *Bidang intelijen*. <https://kejari-kotamalang.kejaksaan.go.id/bidang/intelijen>

Kejaksaan Negeri Kota Malang. (2025). *Bidang pidana umum*. <https://kejari-kotamalang.kejaksaan.go.id/bidang/pidum>

Kejaksaan Negeri Kota Malang. (2025). *Bidang pidana khusus*. <https://kejari-kotamalang.kejaksaan.go.id/bidang/pidsus>

Kejaksaan Negeri Kota Malang. (2025). *Bidang perdata dan tata usaha negara*. <https://kejari-kotamalang.kejaksaan.go.id/bidang/ptu>

Kejaksaan Negeri Kota Malang. (2025). *Bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan*. <https://kejari-kotamalang.kejaksaan.go.id/bidang/barangBukti>

Lita, R. (2025). *Optimalisasi peran kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)*. <https://example.com/34851-ID-optimalisasi-peran-kejaksaan-dalam-proses-penyidikan-tindak-pidana-korupsi-studi.pdf>

Wawancara

Pontoh, G. A. (2025, Juni 16). Wawancara pribadi. Jaksa Seksi Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Kota Malang, pukul 11.25 WIB.